

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DESA LABUHAN HAJI KECAMATAN
LABUHAN HAJI TAHUN 2020
(Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

KURNIATUN AINI

NIM. 218130009

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DESA LABUHAN HAJI KECAMATAN
LABUHAN HAJI TAHUN 2020
(Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)

Disusun dan Diajukan Oleh :

KURNIATUN AINI
NIM.218130009

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

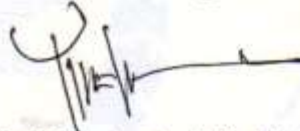
Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi
Mataram, 10 Februari 2022

Pembimbing I



Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN.0008075914

Pembimbing II



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DESA LABUHAN HAJI KECAMATAN LABUHAN
HAJI TAHUN 2020**

(Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)

Disusun dan Diajukan Oleh :

KURNIATUN AINI
NIM.218130009

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 10 Februari 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan
Tim Penguji,

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
NIDN.0008075914

Penguji I



2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**
NIDN.0827118801

Penguji II



3. **Iskandar, S.Sos., MA.**
NIDN.0802048904

Penguji III



Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali Ihsan, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : Kurniatun Aini
Nim : 218130009

Memang benar skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur) adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Kurniatun Aini
NIM.218130009



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniatun Aini
NIM : 218130009
Tempat/Tgl Lahir : Selong, 2 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 081938651302
Email : kurniatunaini289@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan desa labuhan haji kecamatan labuhan haji tahun 2020 (Studi kasus dinas kelautan dan perikanan kabupaten Lombok timur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 Maret 2022
Penulis



NIM 218130009

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniatun Aini
NIM : 218130009
Tempat/Tgl Lahir : Selong, 2 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fkipol
No. Hp/Email : kurniatunaini289@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan desa labuhan hgi kecamatan labuhan hgi tahun 2020 (Studi kasus dinas kelautan dan perikanan kabupaten lombok timur)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 maret2022

Penulis



NIM. 218130009

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

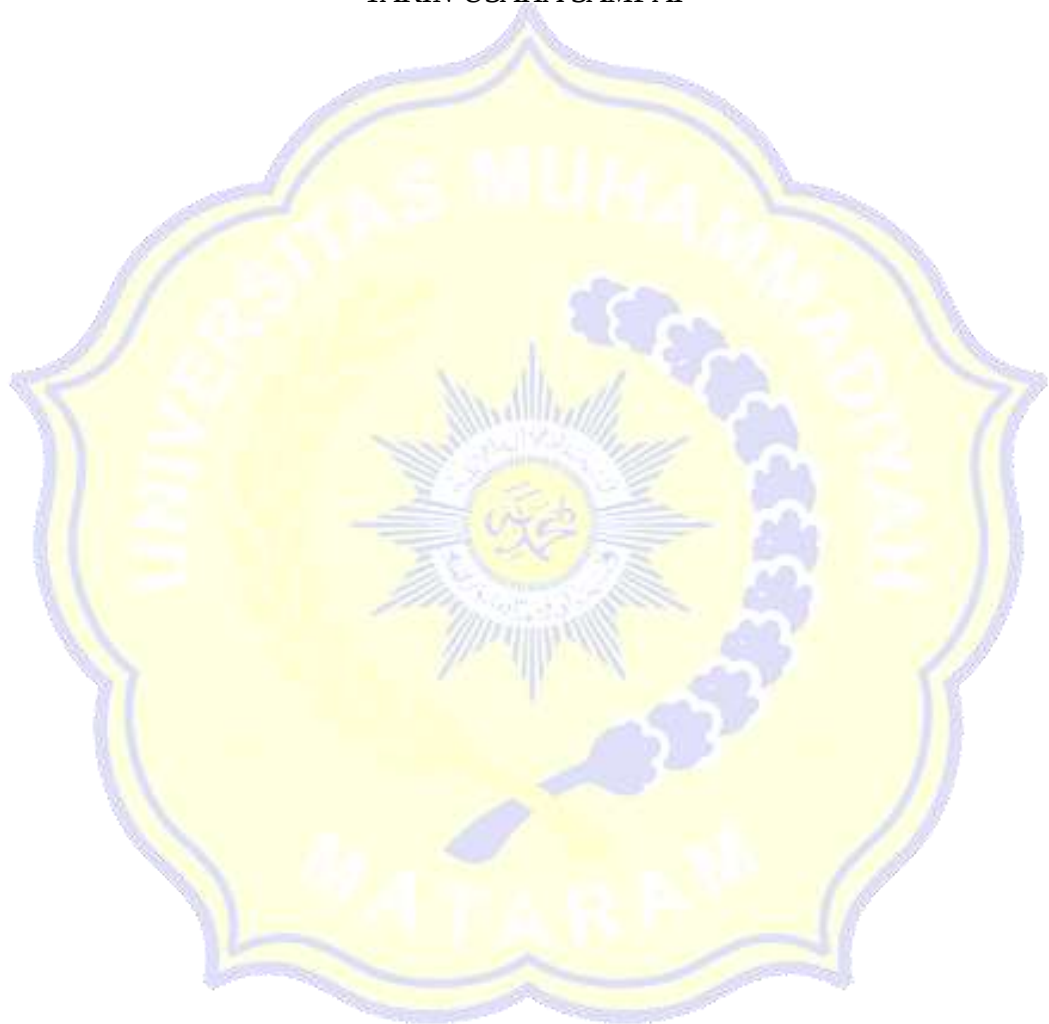
NIDN. 0802048904

MOTTO

*Jangan mengkhawatirkan masa depan yang terpenting tetaplah berbuat baik
maka Allah akan membalas kebaikanmu dimasa depan*

“Bersyukur Dan Ikhlas”

YAKIN USAHA SAMPAI



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan telah diselesaikannya skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih dan mepersembahkannya kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Samudin dan ibu Siti Saupiah yang senantiasa memberikan dukungan berupa do'a dan menjadi penyemangat terhebat selama perjalanan skripsi ini.
2. Kepada keluarga besar Mbah Mahirat yang telah memberikan dukungan moril serta financial dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada kakak tercinta Surya Abdul Muthalib dan istri Baiq Azmi Syukroyanti yang telah memberikan doa beserta dukungan sehingga saya bisa melangkah sampai saat ini.
4. Kepada sahabat tercinta Yunia Laeli Triastika, Fiki Hayatuki Dan Zurriyatun Thayyibah yang selalu memberikan semangat sampai saat ini.
5. Kepada teman – teman KKN Aikmel Barat, terima kasih sudah mau direpotkan dalam segala hal dan selalu membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fisipol dan Formasi Pakar UMMat.
7. Kepada seluruh keluarga besar Prodi Ilmu Pemerintahan, khususnya dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pembelajaran dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada teman - teman tercinta kelas A ilmu pemerintahan angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)”** skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya kerja sama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan petunjuk dengan sabar dan teliti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga selalu sabar dalam memberikan bimbingan selama proses konsultasi berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman – teman seperjuangan yang tentunya tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang selalu memberi semangat, membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, 18 Desember 2021

Penulis

Kurniatun Aini
NIM. 218130009

ABSTRAK

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020

(Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)

Oleh :

Kurniatun Aini

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)” . Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah melihat keberhasilan yang dilakukan oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020 melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Kesimpulan data. Sedangkan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran dan pemberdayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Lombok timur melalui dinas kelautan dan perikanan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dari masing-masing kepala bidang, serta adanya program melalui lembaga swadaya masyarakat, yaitu WCS. Pemberdayaan yang dilakukan di tuangkan dalam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pemberian bantuan perahu, mesin kapal dan melakukan pelatihan olahan serta membantu dalam pemasaran produk ataupun hasil tangkap nelayan, selain itu juga peneliti mendapatkan hasil temuan pemerintah membantu dalam mengakses permodalan guna mengembangkan usaha nelayan.

Kata kunci : Peran, Pemberdayaan, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

ABSTRACT

The Government Role in Improving the Fisherman's Empowerment on the Community of Labuhan Haji Village, Labuhan Haji in 2020 (Case Study at the Department of Marine Affairs and Fisheries of East Lombok Regency)

**By :
Kurniatun Aini**

This research is entitled "The Government Role in Improving the of the Fisherman's Empowerment on the Community of Labuhan Haji Village, Labuhan Haji in 2020 (Case Study of the Marine and Fisheries Service of East Lombok Regency)". The purpose of this study is to determine the government's success in improving the empowerment of fishermen in Labuhan Haji Village, Labuhan Haji in 2020, through the East Lombok Regency's Marine and Fisheries Service.

A qualitative research approach with technical data analysis, namely data reduction, data presentation, and data conclusion, was employed in this study. While the role and empowerment theory was applied in this study. The findings of this study show that the East Lombok government's role and empowerment is carried out through the marine and fisheries service in the form of counseling from each field head, as well as a program run by a non-governmental organization, namely WCS. The empowerment is carried out as part of programs to improve the community's welfare, such as providing boat assistance, ship engines, and conducting processed training, as well as assisting in the marketing of products or fishermen's catches. In addition, researchers receive findings from the government to assist in the accessing of capital to develop fishing businesses.

Keywords: *Role, Empowerment, Department of Marine Affairs and Fisheries, East Lombok Regency*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Akademis	7

1.4.3 Manfaat Teoritis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	22
2.2.1 Definisi Peran	22
2.2.2 Indikator Peran	27
2.2.3 Aspek Peran	27
2.2.4 Pemberdayaan	31
2.2.5 Kesejahteraan	36
2.3 Kerangka Berfikir	39
2.4 Definisi Konseptual	40
2.5 Definisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Metode Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Pemilihan Narasumber	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Lokasi Geografis	48
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	50

4.1.3 Topografi	50
4.1.4 Sejarah Kabupaten Lombok Timur.....	51
4.2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	57
4.2.1 Struktur Organisasi	58
4.2.2 Visi dan Misi	59
4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	61
4.3 Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Labuahan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur).....	63
4.3.1 Peran	63
4.3.2 Pemberdayaan	74
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1	Batas Wilayah Kabupaten Lombok Timur.....	48
Tabel 4.2	Jumlah Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Lombok Timur	49
Tabel 4.3	Topografi Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017	51
Tabel 4.4	Jumlah distrik kabupaten lombok timur pada masa Onder Afdeeling.....	52
Tabel 4.5	Nama Kelompok Nelayan, pengolah dan Aktor di Desa Labuhan Haji.....	65
Tabel 4.6	Aktivitas Pertemuan dan kegiatan Penyuluh Perikanan Lapangan	69
Tabel 4.7	Tingkat Keberhasilan Program dan total Anggaran yang terserap Tahun 2020.....	72
Tabel. 4.8	Akseibilitas Kelompok Nelayan Terhadap Program Pemberdayaan.	77
Tabel 4.9	Pelatihan nelayan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur untuk peningkatan perbaikan usaha.....	81
Tabel 4.10	Hasil olahan kelompok nelayan pengolah MOLEK	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai kurang lebih 81.000 kilometer dan jumlah penduduk sebanyak 16,42 juta jiwa yang mendiami wilayah pesisir Indonesia. Sedangkan Indonesia memiliki 8.090 desa pesisir yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sepanjang garis pantai ini wilayah pesisirnya relatif sempit, namun memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan yang sangat penting. Garis pantai yang panjang, didukung oleh kondisi geografis, ditambah dengan potensi besar keberadaan di laut, telah memperkaya sumber daya alam masyarakat Indonesia (Zulfiani, A Gau Kadir & Nurlinah, 2012).

Di sisi lain, luas laut Indonesia sekitar 3.544.000 kilometer persegi, dan memiliki potensi besar mulai dari potensi sumber daya perikanan seperti penangkapan ikan, budidaya laut dan perairan umum. Pendapatan dari sektor perikanan diperkirakan mencapai US\$82 miliar per tahun, karena perikanan dapat menyerap 5,35 juta tenaga kerja langsung yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut, 470.000 nelayan umum dan 2,65. , Memberikan banyak lapangan pekerjaan. Satu juta perusahaan akuakultur (Ayu Mentari Suryadi dan Sufi, 2019).

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 2014 yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang No. 1. Pasal 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang dimana pasal 63 menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat pesisir, dan pemerintah serta pemerintah daerah mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat. Kewajiban. Melalui peningkatan kapasitas, kami memberikan akses teknologi dan informasi modal, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya. Undang-undang di atas adalah tempat orang terlibat dalam kegiatan budaya dan tanah. Kami telah mengkonfirmasi bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam memantau kualitas pesisir secara teratur lingkungan, baik wilayah uap maupun laut/pengawasan, sehingga pemerintah dapat menentukan arah pola pembangunan. Memiliki data pesisir dan kualitas dasar (Farah Dessy Tuasamu, 2019).

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi program nasional pemerintah dan swasta di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat tidak lebih dari upaya untuk mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan. Penguatan komunitas tidak membuat masyarakat semakin bergantung pada berbagai program amal. Dorongan utama dari konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi menjadi subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Theresia, 2015).

Pengembangan sumber daya manusia yang paling berpengaruh adalah pendidikan, yang mana pendidikan terkait erat dengan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan hubungan. Sumitro mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah syarat penting untuk meningkatkan martabat manusia.

Dengan pendidikan, anggota komunitas mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mengatur kehidupan mereka. Pengembangan pendidikan dalam sumber daya manusia adalah untuk membuat orang mampu membangun diri mereka sendiri, dalam arti pengiktirafan potensi mereka, halangan yang mereka hadapi, dan kemampuan untuk mengatasi mereka. Untuk menyelesaikan halangan ini, tentu saja, dengan bantuan fasilitator. Mengenai pengembangan sumber daya manusia pantai, masyarakat secara keseluruhan bergabung dengan forum kelompok nelayan (Suhaeti and Basuno, 2013).

Mubyarto (2012:10) mengemukakan bahwa masyarakat pesisir atau nelayan selalu mengacu pada hierarki kelompok masyarakat yang sama dengan kelompok masyarakat yang jahil dan terbelakang. Tingkat pendidikan dan keterampilan mereka tetap rendah. Pendidikan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir karena pada dasarnya manusia di wilayah pesisir mengendalikan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpegang pada kaidah kelestarian lingkungan. (Supriharyono, 2015).

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, yang mata pencahariannya sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Sumber daya tersebut meliputi hewan, tumbuhan, dan tanah yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau untuk budidaya. Selama ini, nelayan telah memberikan kontribusi nyata bagi perikanan dan pembangunan lingkungan laut, serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan (Marta dan Andri,

2020:55).

Penelitian tentang komunitas nelayan terutama difokuskan pada aspek sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat yang mengalami kemiskinan yang sangat intensif. Kemiskinan ini disebabkan oleh kompleksnya faktor-faktor yang saling terkait dan merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan wilayah pesisir (Kusnadi, 2017).

Pemberdayaan masyarakat nelayan didefinisikan sebagai pengembangan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk kemandirian sosial, ekonomi, dan politik, potensi masyarakat nelayan untuk mengelola sumber dayanya untuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kemandirian masyarakat nelayan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan posisi tawar mereka agar mampu mengembangkan wilayah dan memanfaatkan sumber daya lingkungan (Nixon, 2015: 272).

Menurut sejarah daerah itu disebut Labuhan Haji, karena pada zaman Belanda dan Jepang, masyarakat Lombok menggunakan pelabuhan ini sebagai tempat pertama untuk pergi ke Mekah, Arab Saudi untuk berziarah. Saat itu, transportasi belum berkembang seperti sekarang, dan pelayaran di laut masih mendominasi. Untuk mencapai Tanah Suci, para peziarah ini bekerja keras di laut, dan dibutuhkan setidaknya tiga bulan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menunaikan haji. Selain digunakan sebagai pelabuhan untuk ziarah, tempat

ini juga berfungsi sebagai pintu gerbang bagi para pedagang Tionghoa untuk memasuki kawasan Lombok. Bisnis mereka cukup sukses dan banyak dari mereka memutuskan untuk bertahan. Hal ini terlihat dari beberapa bangunan tua di dekatnya dan rumah-rumah dengan budaya khas Tionghoa. Beberapa kuburan warga Tionghoa juga bisa ditemukan di kawasan Penede Gandor, sekitar 500 meter dari pelabuhan. Namun, sejak Gerakan 30 September/PKI tahun 1965, keberadaan keturunan Tionghoa Labuhan Haji perlahan menghilang. Seperti di daerah lain, ada pembersihan Cina di daerah itu pada saat itu. (lomboktimurkab.go.id, diakses Senin 10 Jan 2022 11:30 WIB)

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan di desa Labuhan Haji, peneliti menemukan fakta yang menarik bahwa desa Labuhan Haji sebagai wilayah pesisir masih masuk dalam kategori tingkat kesejahteraan rendah. Yang dimana terlihat dari aktivitas perekonomian masyarakat setempat yang hanya berpacu pada penjualan hasil nelayan yang tidak memiliki nilai lebih atau masih di bawah harga pasaran. Disamping itu dalam konteks pemberdayaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh pemerintah di desa Labuhan Haji yang masih belum banyak terlihat, diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan bahwa mereka belum merasakan dampak yang signifikan dari program yang telah dilakukan, pendapatan mereka pun tidak bisa meningkat karena disebabkan oleh berbagai faktor yaitu salah satunya laut tercemar limbah pabrik dan kemudian alat tangkap yang digunakan masih sangat sederhana, dari berbagai faktor tersebut sangat berdampak untuk

nelayan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bantuan alat tangkap yang hanya jaring dan pancing bagaimana bisa mendapatkan banyak ikan, kalau tidak bisa mendapatkan banyak ikan, lalu bagaimana bisa meningkatkan penghasilan dari nelayan. (Hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan mandar jaya dua)

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang bagaimana sebenarnya peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan, selain dari itu peneliti juga ingin mengetahui apakah dalam melakukan pemberdayaan tersebut ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir dalam konteks ini ialah para nelayan yang ada di desa Labuhan Haji.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut, yang menjadi subyek penelitian:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

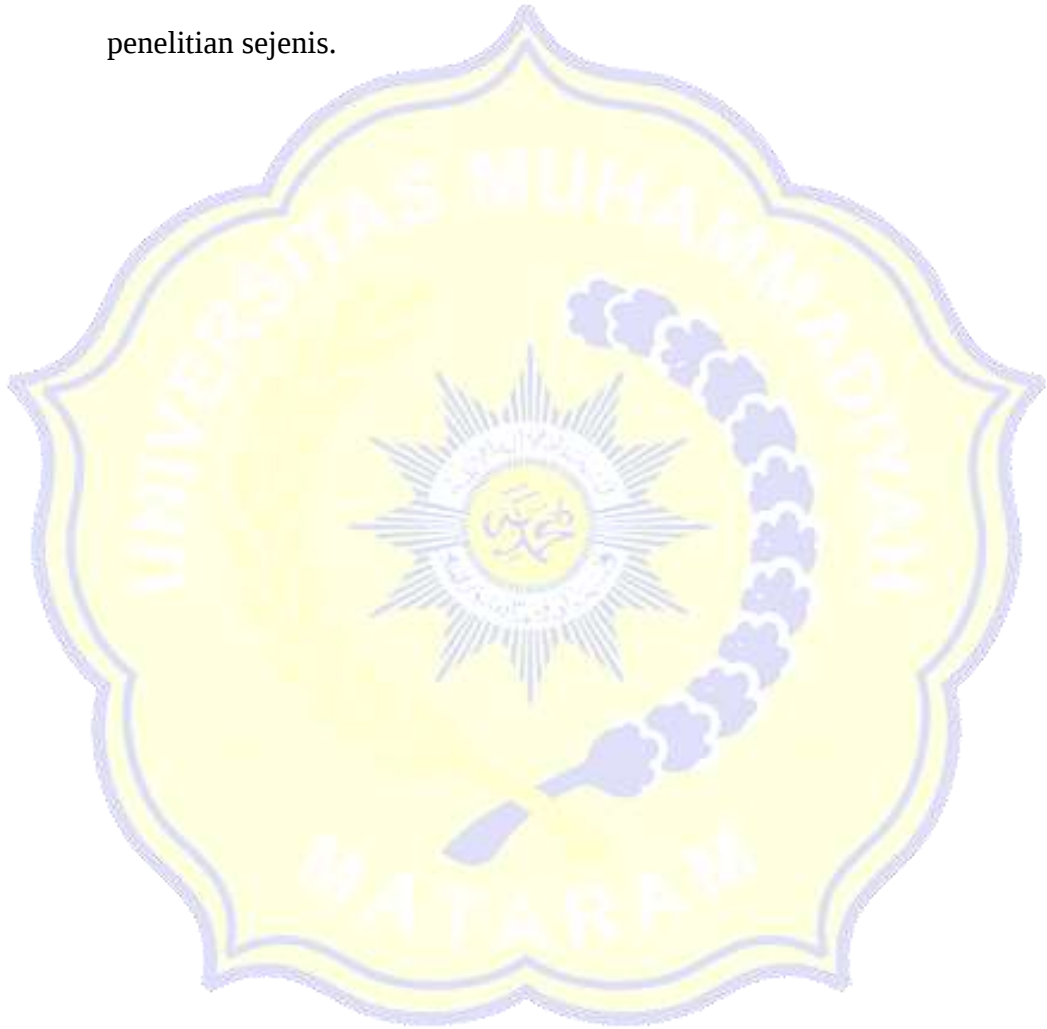
1. Lebih menarik perhatian politisi kepada masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berkualitas.
2. Masyarakat dapat memahami pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Teoritis

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan dan penelitian lebih lanjut untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Diharapkan kedepannya dapat memberikan bahan dan referensi untuk penelitian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang relevan agar tidak terjadi duplikasi penyamaan validitas dan validitas penelitian.

Berdasarkan hal tersebut dalam usaha penelusuran yang telah dilakukan peneliti mendapatkan dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya sebagai satu bahan pembanding, sekaligus mencari objek kajian penting dari penelitian yang lainnya. Studi sebelumnya meliputi: Salah satunya adalah majalah Junal yang berjudul “Arah Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan)” karya Farah Dessy Tuasamu di Mamu Ahamret, Desa Shila, Kecamatan Reshitu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pencatatan. Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hal ini direncanakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bersama dengan hasil penelitian. Perencanaan berorientasi pada tindakan karena dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (tentu saja lebih baik). Tujuan yang diinginkan adalah untuk memecahkan masalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana tersebut secara sadar ditujukan pada perbaikan yang diinginkan dan berusaha untuk perbaikan yang sistematis

dan diinginkan. Perencanaan juga mencakup tindakan penjadwalan secara logis, langkah demi langkah, dan terus menerus sesuai dengan serangkaian tujuan atau sasaran untuk mencapainya. Rencananya, untuk menjawab semua keluhan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di pemukiman Mamua Negeri Hira di Kecamatan Reichs Kabupaten Maluku Tengah. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah untuk membahas bagaimana proses pemerintah dapat memberdayakan masyarakat nelayan, dengan harapan masyarakat dapat mencapai berbagai harapan jangka pendek, menengah dan panjang, meningkatkan taraf hidup mereka di masa yang akan datang. Pokok-pokok karya ilmiah yang disusun oleh Farah Dessy Tuasamu ini dapat menjadi acuan bagi penulis. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, seperti penempatan titik dan koma, jika Anda meletakkan titik di akhir kalimat, huruf berikutnya secara otomatis menggunakan huruf besar, jika tidak, huruf kecil.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Zulfiani, A. Gao Kadir dan Nurlina, berjudul "Analisis peran otoritas tempatan dalam memperluas kemampuan komunitas pantai di daerah Polevali, Regentiy Polevali Mandar." Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: Metode pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Dalam analisis data penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah peran pemerintah lokal dalam memperluas kapasitas masyarakat pesisir. Mengurangkan kemiskinan di daerah pesisir dan pusat perikanan adalah salah satu langkah strategis dalam pengembangan perikanan dan perikanan. Menurut Badan Pusat

Statistik (CSO), ada 7,87 juta penduduk miskin pesisir, atau 25,14% dari total penduduk miskin negara itu yang berjumlah 31,02 juta jiwa. Kabupaten Polewali Mandar memiliki garis kemiskinan Rp 182.396 pada tahun 2013 (per 2013). Tujuan PNPM Mandiri KP adalah untuk meningkatkan peluang usaha dan kesejahteraan, mengembangkan wirausaha anggota KUKP dan meningkatkan kualitas lingkungan. Tujuan PNPM Mandiri KP adalah untuk mengembangkan KUKP di kabupaten/kota yang meliputi perikanan komersial, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil ikan, serta industri kecil garam dan masyarakat pesisir lainnya. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan pemberdayaan masyarakat nelayan untuk mengentaskan kemiskinan pesisir di Pusat Perikanan bagian dari Strategi Pengembangan Kelautan dan Perikanan, sehingga melaksanakan PNPM untuk meningkatkan kapasitas komersial dan kesejahteraan masyarakat. Pokok-pokok karya ilmiah Zulfiani, A. Gau Kadir dan Nurlinah dapat dijadikan acuan bagi penulis. Meskipun bagian yang disingkat masih memiliki kekurangan, bagian yang disingkat tidak diperpanjang.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ayu Mentari Suryadi & Sufi dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara) Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data-data yang di kumpulkan kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis kualitatif.

Dengan hasil penelitian adalah Strategi pemerintah dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan yaitu dengan cara memberikan bantuan berupa alat tangkap kepada nelayan, strategi tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatkan hasil tangkapan para nelayan, sehingga sangat membantu para nelayan dan bisa mensejahterakan nelayan pada umumnya. Hambatan internal yaitu kurangnya jumlah bantuan dan anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia, serta kurangnya pengawasan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dengan cara pemerintah memberikan bantuan berupa alat tangkap kepada nelayan, strategi pemerintah tersebut sangat membantu para nelayan untuk dapat mensejahterakan para nelayan pada umumnya. Kritik Point karya ilmiah yang disusun oleh Ayu Mentari Suryadi & Sufi ini dapat memberikan referensi kepada penulis. Meskipun masih ada kekurangan di referensinya hanya menggunakan jurnal dapat dilihat di bagian daftar pustaka, diharapkan untuk bisa menambah referensinya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Reynald Rumulus, Johnny Lumolos dan Michael Mantiri berjudul "Peranan pemerintah desa dalam memperluas hak dan kemampuan masyarakat (Penelitian kelompok nelayan di desa Trikora, distrik Cayman, Regent Cayman, Provinsi Papua Barat). Metode yang digunakan adalah penelitian yang berkualitas menggunakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan analisis data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti menemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengembangan

hak dan kemampuan, yaitu: penyediaan bantuan yang tidak mencukupi, pengembangan hak dan kemampuan yang dilakukan tidak dapat dirasakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan, pengembangan hak dan kemampuan tidak dilakukan selama kepemimpinan kepala desa, yang ada sekarang, dan pemberian kuasa kepada kepala desa lama tidak sesuai dengan tujuan dan tidak optimal. Permasalahan tersebut memerlukan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga pemerintah desa secara optimal menjalankan misinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok nelayan. Sebelum membuat Program Pembinaan Pemerintah Desa Tricola diawali dengan musyawarah tingkat masyarakat yang bertujuan untuk membahas semua kegiatan yang diajukan oleh tingkat RT/RW dalam satu desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/ Dilanjutkan ke musyawarah desa tempat RW berpartisipasi. LPMD, BPD dan pemerintah desa. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membicarakan bagaimana peran pemerintah untuk dapat membantu mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan namun pada pemberdayaan yang terjadi yaitu, pemberian bantuan yang kurang memadai, tidak tepat sasaran dan kurang maksimal. Kritikal Point karya ilmiah yang di susun oleh Reinaldo Rumlus, Johnny Lumolos dan Michael Mantiri dapat memberikan referensi kepada penulis namun masih ada kekurangan dibagian penempatan tanda baca.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Vindasay, Mohammad Masood Saeed dan Hayat berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumep). Penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan penyajian yang objektif dari berbagai macam data yang dikumpulkan di lapangan, sedangkan penelitian didasarkan pada observasi dan wawancara, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan variabel sebanyak-banyaknya. mungkin terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Menurut hasil penelitian, dalam kehidupan setiap orang ada peran dalam hidupnya. Menurut Poerwadarminta (Cahya, 2017:22), peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam keadaan atau peristiwa tertentu, dimana tindakan yang dilakukan itu diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang yang bertempat tinggal atau mempunyai tujuan tertentu. derajat status tatanan sosial. Sekali lagi, dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Menurut Van Poelje Jum Anggraini (2012:14), pemerintah dalam arti luas adalah suatu fungsi yang meliputi tindakan, tindakan dan keputusan oleh instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah badan/lembaga/peralatan negara yang dipercayakan oleh pemerintah atau yang menyelenggarakan tugas pemerintahan. Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah untuk membicarakan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Daftar pustaka ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis data yang dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Peran pemerintah sangat penting karena fungsi pemerintah yang meliputi tindakan, tindakan dan keputusan untuk mencapai tujuan, dapat

meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Ini mensejahterakan masyarakat, khususnya nelayan, dan memungkinkan harapan masa depan bagi masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Poin-poin kritis penelitian ilmiah yang ditulis oleh Windai, Muhammad Mas'ud Said, Hayat dapat memberikan referensi kepada penulis, tetapi kata deskripsi masih memiliki kekurangan dan perlu lebih teliti.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Farah Dessy Tuasamu (2019)
	Judul	Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu.
	Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Perencanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Perencanaan berorientasi pada tindakan karena dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (tentu saja lebih baik). Tujuan yang diinginkan adalah untuk memecahkan masalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana tersebut secara sadar ditujukan pada perbaikan yang diinginkan dan berusaha untuk perbaikan yang sistematis dan diinginkan. Perencanaan juga mencakup tindakan penjadwalan secara logis, langkah demi langkah, dan terus menerus sesuai dengan serangkaian tujuan atau sasaran untuk mencapainya.

		Rencananya, untuk menjawab semua keluhan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di pemukiman Mamua Negeri Hira di Kecamatan Reichs Kabupaten Maluku Tengah.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis membahas bagaimana proses pemerintah dapat memberdayakan masyarakat nelayan dengan harapan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui berbagai persoalan jangka pendek, menengah dan panjang. masyarakat nelayan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang.
	Kritikal Point	Karya ilmiah yang di susun oleh Farah Dessy Tuasamu ini dapat memberikan refrensi kepada penulis. Meskipun masih ada kekurangan didalamnya seperti penempatan titik dan koma yang seharusnya kalau sudah mencantumkan titik dibagian akhir kalimat otomatis huruf selanjutnya huruf kapital namun sebaliknya dicantumkan huruf kecil.
2.	Nama Peneliti	Zulfiani, A. Gau Kadir dan Nurlinah (2012)
	Judul	Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Peran pemerintah daerah dalam

		pemberdayaan masyarakat pesisir Penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan. Menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat 7,87 juta orang miskin di wilayah pesisir, atau 25,14% dari 31,02 juta orang miskin di negara ini. Pada tahun 2013, garis kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar adalah Rp 182.396 (BPS 2013). Tujuan PNPM Mandiri KP adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan, mengembangkan wirausaha anggota KUKP dan meningkatkan kualitas lingkungan. PNPM Mandiri KP bertujuan untuk mengembangkan KUKP di kabupaten/kota yang meliputi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil ikan, garam rakyat dan masyarakat pesisir lainnya.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan pemberdayaan masyarakat nelayan untuk mengentaskan kemiskinan pesisir di Pusat Perikanan bagian dari Strategi Pengembangan Kelautan dan Perikanan, sehingga melaksanakan PNPM untuk meningkatkan kapasitas komersial dan kesejahteraan masyarakat.

	Kritikal Point	Karya ilmiah yang di susun oleh Zulfiani, A. Gau Kadir dan Nurlinah ini dapat memberikan refrensi kepada penulis. Meskipun masih ada kekurangan pada bagian penyingkatan kata tidak ada kepanjangan pada penyingkatan tersebut.
3.	Nama Peneliti	Ayu Mentari Suryadi & Sufi (2019)
	Judul	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara).
	Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Strategi pemerintah untuk memperkuat masyarakat nelayan adalah dengan memberikan dukungan kepada nelayan berupa alat tangkap. Strategi ini berdampak besar pada peningkatan hasil tangkapan nelayan, sehingga sangat membantu nelayan dan dapat membantu nelayan pada umumnya untuk mensukseskan. Hambatan internal yaitu kurangnya dukungan dan anggaran, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan. Hambatan eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya keterlibatan masyarakat.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah berbicara tentang pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan pemerintah, yang memberikan

		dukungan kepada nelayan berupa alat tangkap. Strategi pemerintah sangat membantu para nelayan untuk membantu para nelayan pada umumnya.
	Kritikal Point	Karya ilmiah yang di susun oleh Ayu Mentari Suryadi & Sufi ini dapat memberikan refrensi kepada penulis. Meskipun masih ada kekurangan di refrensinya hanya menggunakan jurnal dapat dilihat dibagian daftar pustaka, diharapkan untuk bisa menambah refrensinya.
4.	Nama Peneliti	Reinaldo Rumlus, Johny Lumolos dan Michael Mantiri
	Judul	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan Di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat).
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mengungkapkan bahwa ada berbagai masalah dengan pemberdayaan. Artinya, dukungan yang kurang memadai, pemberdayaan yang dilaksanakan tidak dirasakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, dan pemberdayaan belum maksimal, sebagaimana kepemimpinan walikota saat ini dan pemberdayaan walikota lama belum mencapai tujuannya. .. Permasalahan

		tersebut memerlukan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga pemerintah desa secara optimal menjalankan misinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok nelayan. Sebelum membuat Program Pembinaan Pemerintah Desa Tricola diawali dengan musyawarah tingkat masyarakat yang bertujuan untuk membahas semua kegiatan yang diajukan oleh tingkat RT/RW dalam satu desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/ Dilanjutkan ke musyawarah desa tempat RWLPMD berpartisipasi. , BPD dan pemerintah Desa.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas bagaimana peran pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, namun dari segi pemberdayaan yang terjadi, bantuan yang diberikan kurang memadai, tidak tepat sasaran.
	Kritikal Point	Karya ilmiah yang di susun oleh Reinaldo Rumlus, Johny Lumolos dan Michael Mantiri dapat memberikan referensi kepada penulis namun masih ada kekurangan dibagian penempatan tanda baca.
5.	Nama Peneliti	Windasai, Mohammad Mas'ud Said dan Hayat (2021)

	Judul	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep).
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Dalam setiap kehidupan manusia, ia memiliki peran unik dalam kehidupan. Menurut Poerwadarminta (Cahya, 2017:22), peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kondisi atau peristiwa tertentu. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang diharapkan dilakukan oleh individu yang dilakukan. Bertempat tinggal atau dalam kedudukan tertentu berkenaan dengan tatanan sosial. Begitu juga pemerintah dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dimana menurut Van Poelje Jum Anggraini (2012:14), yang secara garis besar disebut pemerintahan adalah suatu fungsi yang meliputi tindakan, tindakan dan keputusan melalui instrumen pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah organ/kekuasaan/badan negara yang dilimpahkan tugas pemerintahan atau pemerintahan.
	Relevansi	Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian penulis membahas tentang peran

		pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Daftar pustaka ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis data yang dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Harapannya pemerintah bisa lebih baik lagi. Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan meliputi berfungsinya pemerintah yaitu tindakan, tindakan dan keputusan untuk mencapai tujuan, sehingga peran pemerintah sangat penting untuk kemakmuran. Masyarakat, khususnya nelayan, ingin bisa menata kehidupannya di masa depan.
	Kritikal Point	Karya ilmiah yang ditulis oleh Windai, Muhammad Mas'ud Said dan Hayat dapat memberikan referensi kepada penulis namun memang masih ada kekurangan didalam penulisan kata sehingga harus bisa lebih teliti.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi peran

Peran berasal dari kata “role”. Peran bermakna, serangkaian tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang menetap di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017: 845) Karakter merupakan bagian dari tugas pokok yang harus dilakukan. Secara etimologis, peran seseorang untuk bertindak dalam situasi dimana perilaku tersebut diharapkan oleh orang lain. Artinya setiap

tindakan yang dilakukan oleh setiap orang memiliki makna yang berarti bagi kebanyakan orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:2), peran dapat diartikan sebagai peran yang dimainkan dalam sebuah film kampanye, sebuah drama yang mengisi ulang dirinya melalui kerja keras dan muatan positif. Selain itu, KBBI menyebutkan bahwa karakter adalah perilaku pemain dengan sifat yang dapat menelurkan dan memindahkan barang dalam suatu acara.

Menurut Poerwadarminta (Cahya, 2017:22), peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam kondisi atau peristiwa tertentu, dimana tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang diharapkan dilakukan oleh individu yang bertempat tinggal atau menduduki posisi tertentu dalam tatanan sosial.

Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian tindakan tertentu yang disebabkan oleh jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana dia melakukan peran itu. Peran yang dimainkan/dimainkan oleh pemimpin tingkat atas, menengah dan bawah memiliki peran yang sama. Sutarto (2019: 138-139) mengemukakan bahwa perannya terdiri dari tiga komponen.

1. Konsep peran, yaitu keyakinan seseorang tentang bagaimana menangani suatu situasi.
2. Ekspektasi peran, ekspektasi orang lain tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam suatu posisi berperilaku.
3. Kinerja peran, yaitu perilaku aktual seseorang dalam suatu jabatan. Jika ketiga komponen ini dikoordinasikan, interaksi sosial akan berkelanjutan dan lancar.

Menurut Koentjaraningrat (2015:13), peran mengacu pada perilaku individu

yang menentukan suatu posisi, sehingga konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan posisi/jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah kompleks harapan manusia tentang bagaimana dan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Bryant dan White mengemukakan dalam Amira, (2012:9) bahwa peran didefinisikan sebagai deskripsi pekerjaan seseorang atau individu yang memiliki harapan tertentu terlepas dari siapa yang memegang posisi tersebut. Definisi ini dapat memperjelas bahwa peran adalah gambaran pekerjaan atau tugas seseorang yang mengandung harapan bagi orang yang memegang jabatan tersebut.

Pembagian peran menurut peran Soekanto (2012: 242) dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut.

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada kegiatan kelompok oleh anggota kelompok berdasarkan posisinya dalam kelompok, seperti: B. Pengurus, pejabat, dll.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompok dan memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi pasif dari anggota kelompok, yang menahan diri dari memberikan kesempatan untuk fungsi lain dalam kelompok dan memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik.

Soekanto (2017:213) menunjukkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia sedang menjalankan peran. Sementara itu, dalam Sarwono (2013:224), Biddle dan Thomas menemukan bahwa peran adalah seperangkat formulasi yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tertentu.

Menurut Riyadi (2012:138), peran dapat diartikan sebagai pemosisian dan konsepsi peran suatu pihak dalam status sosial. Dengan peran ini, aktor individu dan organisasi bertindak sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Menurut Kahn (dalam Miftah, 2012:10), integrasi organisasi adalah peleburan komponen peran, norma dan nilai. Peran adalah seperangkat tindakan yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pemahaman seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain darinya, dan kesediaannya untuk mematuhi mereka yang menetapkan harapan tersebut.

Menurut Robert K. Merton (2013: 3), ia mengambil pandangan yang berbeda dari Linton dalam studi perannya, memperkenalkan konsep set peran yang didefinisikan sebagai "Pelengkap peran yang dimiliki seseorang dengan menerapkan "hubungan peran pelengkap" khusus yang dimiliki seseorang karena status sosialnya.

Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau lembaga/organisasi. Peran-peran yang harus dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran dapat dibagi menjadi dua jenis: peran yang diharapkan dan peran yang sebenarnya. Ada faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran tersebut (Syamsir, 2014: 86).

Selain itu, (Kahn (Ahmad dan Taylor, 2019: 554)) menyatakan bahwa lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi ekspektasi peran-perilaku individu, karena

ekspektasi tersebut berperilaku dengan cara tertentu. Ada berbagai cara (individu menerima pesan dan merespons dengan tepat.), tetapi pesan tidak terkomunikasikan dengan jelas, tidak mudah diterima, dan pesan penerima. Jika Anda tidak mengikuti pegang, akan terjadi masalah dan pesan akan dianggap ambigu, dan jika ini terjadi, individu akan merespons dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan pengirim. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dalam posisinya sendiri, berarti dia memenuhi perannya. Keberadaan peran bermula dari latar belakang yang berbeda, dan peran serta kedudukan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Adanya peran berarti bahwa kedudukan tersebut menjadi dasar bagi setiap tindakan atau peran yang muncul dari kesempatan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. (Siargian(2012:212)

Konsep peran menurut Sukanto (2012:213) adalah sebagai berikut:

1) Persepsi Peran

Persepsi peran adalah pandangan kita tentang tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu. Persepsi ini didasarkan pada interpretasi tentang apa yang kita pikirkan tentang bagaimana kita harus bersikap.

2) Ekspektasi Peran

Harapan dari sebuah peran adalah bahwa orang lain percaya pada bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Perilaku seseorang terutama ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks di mana orang tersebut berperilaku.

3) Konflik Peran

Ketika seseorang menghadapi ekspektasi peran yang berbeda, konflik peran muncul. Konflik ini terjadi ketika seseorang merasa lebih sulit untuk memenuhi

persyaratan dari satu peran daripada yang lain.

2.2.2 Indikator Peran

Kondisi peran dalam Soerjono Soekanto (2012: 243) meliputi tiga hal penting, yaitu:

1. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau status individu dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat aturan yang memandu kehidupan seseorang dalam masyarakat.
1. Peran adalah konsep perilaku yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
2. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.3 Aspek Peran

Menurut Biddle dan Thomas (2015:224) mereka membagi terminologi teori peran menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Orang yang terlibat dalam interaksi sosial
 2. Perilaku yang terjadi dalam interaksi
 3. Kedudukan manusia dalam tingkah laku.
 4. Hubungan antara orang dan perilaku.
- a) Orang yang terlibat dalam interaksi sosial

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang - orang yang mengambil bagian dalm interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. Aktor yaitu orang-orang yang bertindak menurut peran tertentu.

b. Tujuan (tujuan atau orang lain, yaitu orang-orang yang berhubungan dengan orang yang bertindak dan perilaku mereka. Orang atau tujuan yang bertindak dapat menjadi individu atau kelompok orang (kumpulan). Hubungan antara kelompok dan kelompok, misalnya, muncul antara kor (pemain) dan pendengar (tujuan). Istilah “actor” digantikan dengan “manusia”, “ego” atau “saya”. Sementara tujuan digantikan dengan istilah “alter-ego”, “ego” atau “tidak-saya”. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa teori peran sebenarnya digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih orang. Menurut Kulli dan Midu, hubungan antara orang yang aktif dan tujuan harus membentuk identitas orang yang aktif (manusia, ego, ego), yang dalam kasus ini di bawah pengaruh penghakiman atau penentuan orang lain (tujuan) yang telah dikumpulkan oleh orang yang aktif. Secord dan Backman mengklaim bahwa aktor menempati posisi sentral (focal position) dan target menempati posisi yang setara dengan posisi sentral (counter position). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa sasaran teori peran berfungsi sebagai mitra aktor (partner).

b) Peri Perilaku yang terjadi dalam interaksi

Menurut Biddle dan Thomas (2015), lima indikator perilaku yang terkait dengan peran adalah sebagai berikut:

a. Harapan tentang peran (expectation)

Harapan untuk sebuah peran adalah harapan orang lain untuk perilaku yang tepat dan harus ditunjukkan oleh seseorang dengan peran tertentu. Harapan untuk perilaku ini diterima secara umum, harapan dari sekelompok orang, dan mungkin harapan dari orang tertentu.

b. Secord dan Backman berpendapat bahwa spesifikasi hanyalah bentuk harapan.

Secord dan Backman membagi tipe yang diharapkan sebagai berikut:

- a) Ekspektasi antisipatif, yaitu ekspektasi terhadap apa yang akan terjadi.
- b) Harapan normatif (harapan peran), perlunya peran pendamping. Harapan kanonik ini selanjutnya dibagi menjadi dua jenis harapan tersembunyi (orang yang bertobat), harapan yang bertahan bahkan jika tidak diucapkan.
- c) Harapan terbuka (publik), yaitu harapan yang diungkapkan. Harapan seperti itu disebut persyaratan peran, dan persyaratan peran dapat menjadi spesifikasi untuk peran terkait melalui proses internalisasi.

c) Kedudukan manusia dalam tingkah laku.

Peran tersebut diwujudkan dalam perilaku aktor. Bentuk tingkah laku tokoh itu nyata dan bervariasi dari satu aktor ke aktor lainnya. Variasi dalam teori peran ini dianggap normal dan tidak memiliki batas.

Teori peran tidak cenderung untuk mengklasifikasikan istilah menurut perilaku tertentu, tetapi didasarkan pada klasifikasi asal perilaku dan sifat tujuannya (motivasi). Oleh karena itu, bentuk-bentuk perilaku peran dapat dikategorikan ke dalam jenis-jenis seperti hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, disiplin anak, pencari nafkah, dan pemeliharaan ketertiban. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya metode khusus untuk peran yang disahkan oleh masyarakat. Ketika tidak sesuai dengan aspek lain dari suatu peran, metode menjadi penting dalam memenuhi peran tersebut. Oleh karena itu, aktor bebas menentukan jalannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan semua aspek peran yang diharapkannya. Sarbin mengatakan bahwa keberadaan peran dapat dibagi menjadi tujuh kelompok

menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri aktor dalam peran yang mereka bawaan. Intensitas terendah adalah situasi di mana aktor sangat tidak berkembang. Perilaku rol otomatis dan mekanis. Tingkat tertinggi akan terjadi ketika aktor melibatkan semua perilaku pribadinya dalam peran.

Goffman melihat representasi karakter dari sudut lain. Dia memperkenalkan istilah depan, yang berarti bahwa beberapa tindakan tertentu diwujudkan sehingga orang lain mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan oleh tindakan (aktor).

d) Hubungan antara orang dan perilaku.

Kalau soal peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa penilaian dan sanksi didasarkan pada ekspektasi norma orang (orang lain). Evaluasi peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku pada perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi adalah upaya aktor untuk mempertahankan nilai positif atau mengubah perwujudan peran sedemikian rupa sehingga yang sebelumnya dipandang negatif menjadi positif.

2.2.4 Pemberdayaan

Suwanto Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:182) Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata power, yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Awalan diberdayakan menjadi "berdaya" berarti kuat, cakap, enerjik, punya alasan (cara, dsb) untuk mengatasi sesuatu. Mendapatkan awalan dan akhiran untuk diberdayakan, yang dapat diartikan sebagai upaya, proses memungkinkan, memungkinkan untuk melakukan tindakan/melakukan sesuatu.

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari istilah power (kekuatan atau

pemberdayaan). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan orang. Khusus untuk kelompok rentan dan lemah, kami memiliki kekuatan dan kemampuan sebagai berikut: (A) Memenuhi kebutuhan akan kebebasan, tidak hanya untuk menyatakan pendapat secara bebas, tetapi juga dalam arti tidak ada kelaparan atau kebodohan. Tanpa rasa sakit: (B) Meningkatkan pendapatan dan menjangkau sumber-sumber produktif di mana Anda bisa mendapatkan barang dan jasa yang Anda butuhkan. (C) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Menurut Widjaja (2013 : 169) pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat mampu mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Edi Suharto (2012:60), “pemberdayaan adalah proses dan tujuan”. Proses Pemberdayaan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan dan memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pada saat yang sama, sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial, yaitu masyarakat yang diberdayakan, diberdayakan, atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mencapai kehidupannya.

Menurut Hikmat (2011) konsep dari pemberdayaan dapat dilihat sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Pada awal kelahirannya, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam

pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dengan demikian merupakan *depowerment* dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan menggantikannya dengan sebuah sistem yang baru, yang memberikan perhatian penting pada gagasan manusia dan kemanusiaan (*humanisme*).

Menurut Sumodiningrat (2013:185) menyatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara mandiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah- masalah mereka sendiri.

Menurut Suharto (2011: 17), ada empat hal tentang pemberdayaan. Yakni, kegiatan terencana dan kolektif, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memprioritaskan kelompok lemah dan kurang beruntung, dan mengimplementasikannya melalui program peningkatan kapasitas.

Mardikanto dan Soebianto (2013: 111-112) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan pendidikan.

Meningkatkan pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, metode, tempat dan waktu, serta memfasilitasi hubungan dan menerima manfaat. Namun yang lebih penting adalah meningkatkan pendidikan, yang dapat menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat.

2. Perbaikan aksesibilitas.

Peningkatan aksesibilitas terutama tentang sumber informasi/inovasi,

sumber pendanaan, penawaran produk dan peralatan, sumber pendanaan, penawaran produk dan peralatan, dan aksesibilitas oleh lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan.

Pendidikan yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih baik Dengan berbagai sumber daya yang lebih baik, diharapkan tindakan yang lebih baik akan diambil.

4. Perbaikan kelembagaan.

Penyempurnaan langkah-langkah yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki sistem, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha.

5. Perbaikan usaha.

Perbaikan di bidang pendidikan, aksesibilitas, acara dan institusi diharapkan dapat meningkatkan bisnis yang sedang berjalan

6. Perbaikan pendapatan.

Perbaikan bisnis diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, termasuk pendapatan keluarga dan sosial.

7. Perbaikan lingkungan.

Pendapatan yang lebih tinggi diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau keterbatasan pendapatan.

8. Perbaikan kehidupan.

Tingkat opini masyarakat dan kondisi lingkungan yang diciptakan batik diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan masyarakat.

Harapannya, kondisi kehidupan yang lebih baik akan mengarah pada kehidupan masyarakat yang lebih baik, didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik.

Proses otorisasi umumnya dilakukan secara kolektif. Namun, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan secara kolektif. Strategi pemberdayaan bisa bersifat pribadi. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dicapai melalui tiga tingkatan atau dimensi pemberdayaan (Suharto, 2011: 66-67), yaitu:

1. Aras Mikro

Pemberdayaan terjadi secara individu melalui instruksi, nasihat, manajemen stres dan intervensi krisis. Tujuannya adalah untuk membimbing atau melatih seseorang dalam pemenuhan tugas-tugas kehidupan. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai sarana intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasa digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut strategi sistem skala besar karena memiliki tujuan yang mengarah pada sistem lingkungan yang lebih luas. Pembuatan kebijakan yang relevan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial yang

dilaksanakan, lobi, organisasi masyarakat, dan keberadaan manajemen konflik merupakan inti dari strategi pendekatan ini. Strategi Sistem Besar menganggap orang memiliki kemampuan untuk memahami situasi mereka dan memilih serta menentukan strategi yang sesuai untuk tindakan mereka.

2.2.5 Kesejahteraan

Kesejahteraan didasarkan pada asal kata “kemakmuran”, yang meliputi arti “setera” yang berarti “payung” dalam bahasa Sansekerta. Asal kata ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang terkandung dalam “Setera” adalah orang kaya, yaitu orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kecemasan serta menjalani kehidupan yang aman dan damai. Secara fisik dan mental (Fahrudin, 2012).

Secara umum istilah bansos sering diartikan sebagai keadaan sejahtera (konsepsi pertama), yaitu keadaan terpenuhinya segala bentuk kehidupan, terutama yang bersifat pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Istilah peduli sosial juga mengacu pada semua kegiatan penyelenggaraan dan penyaluran pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Pelaksanaan berbagai sistem perlindungan sosial formal dan informal merupakan contoh kegiatan kesejahteraan sosial (Suharto, 2018).

Secara umum, teori kesejahteraan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pendekatan utilitarianisme klasik, teori kesejahteraan neoklasik, dan pendekatan neokontraktualis (Albert dan Hahnel, dalam Sugiarto 2017):

1. Pendekatan utilitarian klasik menekankan bahwa kebahagiaan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan ditingkatkan. Prinsip individu adalah untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan mereka, sedangkan untuk komunitas itu

adalah prinsip dalam kehidupan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok mereka.

2. Pendekatan teori kesejahteraan neoklasik menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari kepuasan semua individu.
3. Pendekatan neo-kontraktualis yang mempromosikan kebebasan maksimum dalam kehidupan individu atau pribadi. Apa yang paling ditekankan oleh pendekatan kontraktualis baru ini adalah bahwa individu akan mengejar konsep barang dan jasa mereka dengan kebebasan maksimum tanpa gangguan apa pun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan menumbuhkan diri untuk memenuhi fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan adalah sistem kehidupan, kehidupan sosial material dan spiritual yang penuh dengan keamanan dan martabat. . Dan kedamaian di dalam dan di luar. Hal ini memungkinkan seluruh warga negara untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosialnya dengan berpegang pada hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pankashira.

Fungsi jaminan sosial ditujukan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosial ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah fungsi kesejahteraan masyarakat yang dikemukakan oleh (Fakhrudin, 2014), yaitu:

1. Fungsi pencegahan. Dalam hal ini, kesejahteraan mencegah Masalah sosial yang muncul dalam masyarakat dengan menciptakan pola hubungan sosial baru.

2. Fungsi penyembuhan. Layanan Kesejahteraan Sosial untuk Dihilangkan dan meningkatkan cacat fisik dan emosional pertanyaan sehingga bisa orang-orang.
3. Mengembangkan fitur. Kesejahteraan sosial berperan dalam proses ini Pembangunan sosial dan sumber daya sosial.
4. Fungsi pendukung. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan berikut: Membantu mencapai suatu tujuan atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

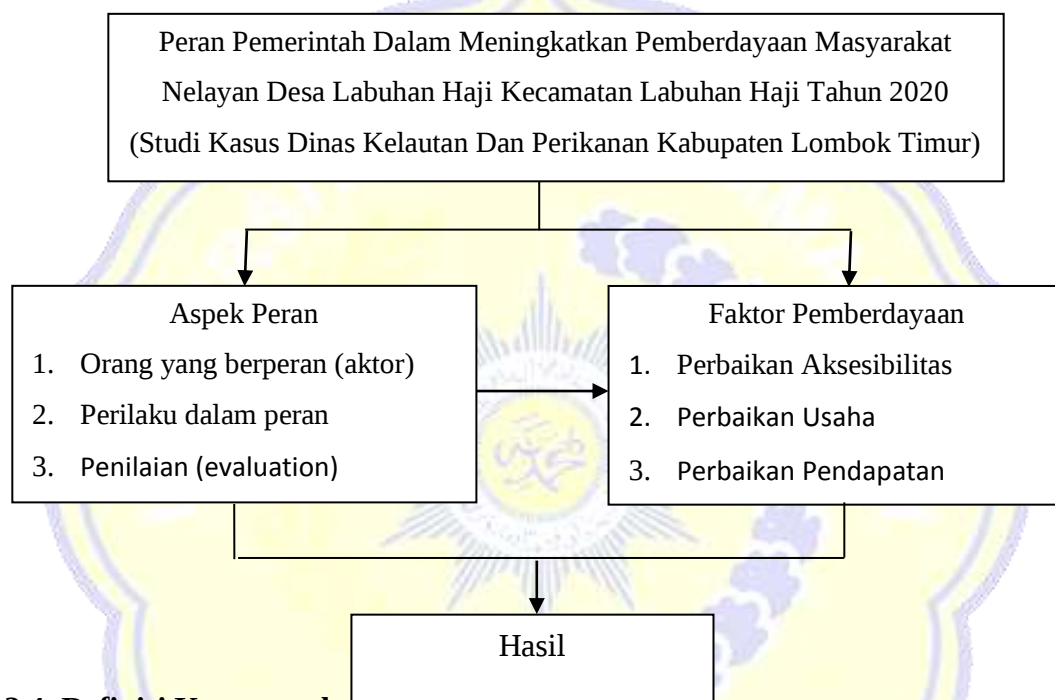
Manfaat adalah tingkat kepuasan yang diterima seseorang dari memperoleh penghasilan, tetapi tingkat manfaat itu sendiri relatif karena tergantung pada tingkat kepuasan yang diterima seseorang dari penghasilan. Kaitan antara konsep ini dengan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka seseorang dianggap sejahtera karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sesuai dengan indikatornya (Pramata et al. 2012:9).

Ismail ddk (2015) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak. Karena keberadaan kesejahteraan berkaitan langsung dengan nilai-nilai kehidupan dan idealisme seseorang. Kesejahteraan seharusnya tidak hanya didefinisikan sebagai ukuran ketersediaan materi, tetapi juga terkait dengan pandangan hidup masyarakat yang diterima. Kesejahteraan tidak hanya merupakan cita-cita individu, tetapi juga merupakan tujuan dari sekelompok individu yang berkumpul di negara untuk menciptakan dua jenis kesejahteraan: kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu adalah kesejahteraan yang dirasakan setiap orang sebagai individu, dan kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang dalam unit tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yang digunakan untuk mendukung dan memandu penelitian untuk mengeksplorasi alur skema pemikiran penulis untuk memberikan gambaran tentang struktur pemikiran berbasis penelitian yang membahas masalah penelitian utama, yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian



2.4 Definisi Konseptual

1. Peran adalah orang atau lembaga yang melakukan suatu tindakan atau usaha yang dikehendaki oleh suatu komunitas atau kelompok, dengan aktor yang memainkannya, sehingga menimbulkan perilaku dan bernilai penting bagi setiap orang, baik kelompok/masyarakat positif maupun negatif.
2. Pemberdayaan adalah proses dan tujuan, dan proses pemberdayaan adalah rangkaian kegiatan untuk memberdayakan dan memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk individu yang mengalami

kemiskinan, dengan menggunakan berbagai strategi atau pendekatan, antara lain aksesibilitas, peningkatan usaha, dan peningkatan pendapatan. .

2.5 Definisi Operasional

No.	VARIABEL	INDIKATOR	ASPEK	SUMBER DATA
1.	Aspek Peran	Orang yang berperan (Aktor)	• Siapa actor/orang/lembaga yang melakukan pemberdayaan • Siapa sasaran dari pemberdayaan	a. Primer b. Sekunder
		Perilaku dalam peran	• Respon/timbal balik/tanggapan dari actor/pelaku/sasaran dari pemberdayaan • Bagaimana tindakan yang dilakukan	a. Primer b. Sekunder
		Penilaian (evaluation)	• Bagaimana dampak yang dirasakan • Bagaimana hasil dari pemberdayaan apakah baik atau	a. Primer b. Sekunder

			buruk	
2.	Faktor – faktor Pemberdayaan	Perbaikan Aksesibilitas	• Apa saja jenis aksesibilitas yang di dapatkan. Misalnya seperti sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran	a. Primer b. Sekunder
		Perbaikan Usaha	• Bagaimana cara melakukan perbaikan usaha nelayan	a. Primer b. Sekunder
		Perbaikan Pendapatan	• Bagaimana cara peningkatan pendapatan masyarakat, apakah berubah atau stagnan	a. Primer b. Sekunder

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode mempelajari dan memahami makna yang oleh beberapa orang atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara deduktif dari topik umum ke topik khusus, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau struktur yang fleksibel. Siapa pun yang berpartisipasi dalam bentuk penelitian ini harus dapat menerapkan perspektif penelitian induktif, berfokus pada makna individu dan menerjemahkan kompleksitas masalah (Susanti, 2020: 32).

Menurut Susanti (2020:32), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang mendalam guna menghasilkan data-data nyata yang ditemukan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan berbagai faktor yang mempengaruhi data dalam konteksnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Adapun penelitian lokasi yang dipilih penulis selain mudah dijangkau oleh peneliti. Serta efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga serta merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi

yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data secara langsung (Sugiyono, 2018:104). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan informan, dalam hal ini para aktor yang terlibat dalam gerakan sosial. Lebih lanjut (Susanti, 2020:33) menyatakan bahwa data primer merupakan bahan otoritatif seperti hasil wawancara, berdasarkan hasil wawancara tersebut akan lebih mudah untuk menggambarkan hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugino, 2015). Data sekunder untuk survei ini adalah data dari subjek survei atau data yang diperoleh dari pencatatan dan pengumpulan dokumen.

Menurut Susanti (2020: 34), data sekunder adalah gerakan sosial yang penulis peroleh dari arsip. Arsip buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Pemilihan Narasumber

Cara menentukan sumber dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purpose sampling, yaitu bagian dari teknik pengambilan sampel

yang secara sadar dipadukan dengan teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena mencerminkan lokasi dan pokok permasalahan yang sudah familiar dengan penelitian. .

Menurut Ruslan, tujuan dari teknik sampling adalah untuk memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang diyakini terkait dengan karakteristik demografi yang telah diketahui sebelumnya. Sementara menurut penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012: 218), ada orang dalam, yaitu seseorang yang dapat memberikan gambaran dan memahami objek penelitian. Adapun informan dari penelitian ini adalah:

No.	Jabatan/Pangkat	Responden
1.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	1 orang
2.	Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	1 orang
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	1 orang
4.	Penyuluh Perikanan Madya	1 orang
5.	Ketua Kelompok Nelayan Mandar Jaya Dua	1 orang
Jumlah		5 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi (Pengamatan).

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2018:106), observasi merupakan dasar dari berbagai ilmu. Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data atau

fakta tentang dunia nyata, yang diperoleh melalui observasi. Lebih lanjut Sugiyono (2018:106) mencatat bahwa peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari suatu perilaku melalui observasi.

2. Wawancara.

Menurut Ibrahim (2020:48), wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi verbal untuk memperoleh informasi yang diinginkan peneliti. Wawancara juga merupakan sarana pengumpulan informasi melalui pertanyaan lisan dan tanggapan lisan melalui kontak pribadi secara langsung.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika seorang peneliti ingin melakukan survei pendahuluan untuk menemukan suatu masalah yang perlu diselidiki, tetapi peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang responden.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen, foto, atau karya monumental seseorang dalam konteks ini, yang merupakan lembaga gerakan sosial. Studi dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam studi kualitatif (Sugiyono, 2018: 124).

Selain itu, Susanti (2020: 37) adalah laporan yang dokumentasinya dapat dilakukan secara tertulis dengan menggunakan foto-foto yang berisi deskripsi data, dan dokumentasi memberikan bukti dan informasi (seperti kutipan dari surat kabar dan foto). merupakan salah satu bentuk koleksi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dari metode ilmiah, karena dapat bermakna dan bermakna dalam memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2018: 129). Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Tahap analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah membuat kesimpulan lebih mudah ditarik dengan memilih, memfokuskan, dan mereduksi validitas data mentah menjadi informasi yang bermakna.

2. Penyajian Data

Representasi data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah dalam bentuk naratif. Representasi data sebagai satu set informasi, sistematis dan dapat dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data sementara masih berkaitan dengan rumusan masalah dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

